

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin berkembangnya UMKM, merupakan suatu reaksi dari adanya revolusi industri pada tahap ke-4 yang semakin menekankan sistem mekanisasi pada proses produksi yang menyebabkan munculnya pengangguran, sehingga pengangguran dan tingkat ketergantungan (*Dependency Ratio*) juga semakin meningkat. Pengangguran yang terjadi karena adanya dampak dari mekanisasi tentu juga berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan tulisan yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Brebes Tahun 2009 – 2011” oleh Slamet Priyo Marmujiono dalam *Economics Development Analysis Journal* yang mengatakan bahwa rasio ketergantungan penduduk berpengaruh pada tingkat kemiskinan. (Marmujiono, 2014). Adapun tabel tingkat kemiskinan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1. Presentase Tingkat Kemiskinan Tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Nama Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)			
	2018	2017	2016	2015
Cilacap	11.25	13.94	14.12	14.39
Banyumas	13.5	17.05	17.23	17.52
Purbalingga	15.62	18.8	18.98	19.7
Banjarnegara	15.46	17.21	17.46	18.37
Kebumen	17.47	19.6	19.86	20.44
Purworejo	11.67	13.81	13.91	14.27
Wonosobo	17.58	20.32	20.53	21.45
Boyolali	10.04	11.96	12.09	12.45
Klaten	12.96	14.15	14.46	14.89
Sukoharjo	7.41	8.75	9.07	9.26
Wonogiri	10.75	12.9	13.12	12.98
Karanganyar	10.01	12.28	12.49	12.46
Sragen	13.12	14.02	14.38	14.86
Grobogan	12.31	13.27	13.57	13.68
Blora	11.9	13.04	13.33	13.52
Rembang	15.41	18.35	18.54	19.28
Pati	9.9	11.38	11.65	11.95

Kudus	6.98	7.59	7.65	7.73
Jepara	7	8.12	8.35	8.5
Demak	12.54	13.41	14.1	14.44
Semarang	7.29	7.78	7.99	8.15
Temanggung	9.87	11.46	11.6	11.76
Kendal	9.84	11.1	11.37	11.62
Batang	8.69	10.8	11.04	11.27
Pekalongan	10.06	12.61	12.9	12.84
Pemalang	16.04	17.37	17.58	18.3
Tegal	7.94	9.9	10.1	10.09
Brebes	17.17	19.14	19.47	19.79
Kota Magelang	7.87	8.75	8.79	9.05
Kota Surakarta	9.08	10.65	10.88	10.89
Kota Salatiga	4.84	5.07	5.24	5.8
Kota Semarang	4.14	4.62	4.85	4.97
Kota Pekalongan	6.75	7.47	7.92	8.09
Kota Tegal	7.81	8.11	8.2	8.26

(Sumber dan diolah dari bps.go.id)

UMKM memberi suatu harapan untuk menekan dampak yang terjadi akibat besarnya tingkat ketidak produktifan seseorang. Penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak digunakan pada proses-proses produksi hingga sampai pada tahap distribusi perlu membutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak yang disebabkan adanya peningkatan pada jumlah UMKM di Indonesia. Berdasar data

dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI, pada Tahun 2016 UMKM yang terdata adalah sebesar 61.651.177 unit hingga tahun 2017 sebesar 62.922.617 unit.

Semakin banyaknya UMKM yang muncul di suatu wilayah, tentu diharapkan oleh pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat agar UMKM memberikan suatu dampak yang positif. Harapan tersebut diupayakan oleh pemerintah dalam bentuk memberikan perhatian pada UMKM dengan dibentuknya undang undang mengenai UMKM. Bahkan pada masa sekarang ini, UMKM hanya diwajibkan untuk membayar pajak sebesar 0.5 persen atas omzet maksimal Rp4,8 miliar pertahun yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada masa pemerintahan Jokowi pada tahun 2018 ini. Kebijakan tersebut disambut baik oleh pelaku bisnis kelas UMKM dan juga pelaku bisnis pada pangsa pasar lainnya. Harapannya, pada diimplementasikan suatu kebijakan tersebut, akan memberi suatu peningkatan peluang usaha dan dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi wirausahawan demi negara Indonesia yang mandiri. Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga, menargetkan ratio wirausaha di Indonesia mencapai 4 persen pada tahun 2017, hal ini ditengarai oleh meningkatnya rasio wirausaha pada tahun 2016 sebesar 3.1 persen dan pada tahun 2015 sebesar 1.67 persen. Ungkapan yang disampaikan di Denpasar, Bali, pada acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UKM pada 21 maret 2017 lalu tentu juga ditengarai oleh keoptimisan pemerintah setelah dikeluarkannya Regulasi UMKM yaitu PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib

pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Banyaknya UMKM yang muncul di suatu wilayah, tentu diharapkan oleh pemerintah daerah seperti dalam hal upaya pengentasan kemiskinan.

Kabupaten Sragen memiliki kuantitas UMKM yang tinggi. Tingginya Kuantitas UMKM yang ada perlu diperhatikan eksistensi UMKM nya melalui regulasi mengenai pembinaan yang dikeluarkan. Regulasi tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang UMKM. Peran pemerintah daerah dalam UMKM terdapat pada bab IV pasal 6 huruf d yang berbunyi “melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan usaha mikro, kecil dan menengah”. Pembinaan UMKM yang tertera pada perda tersebut tersurat dalam bab VII pasal 14 sampai pasal 15. Berikut gambaran kenaikan eksistensi UMKM di Kabupaten Sragen dalam tabel.

Tabel 1. 2. Jumlah Perijinan Usaha yang Dikeluarkan

No	Kecamatan	2014			2015		
		Kategori Perizinan Usaha					
		Besar	Menengah	Kecil	Besar	Menengah	Kecil
1	Kalijambe	0	2	43	0	5	36
2	Plupuh	0	1	50	0	0	28
3	Masaran	2	20	148	1	7	124
4	Kedawung	0	8	92	0	4	92
5	Sambirejo	0	3	45	0	0	41
6	Gondang	0	2	75	0	2	52
7	Sambungmacan	0	8	73	1	1	70
8	Ngrampal	0	9	73	0	4	78
9	Karangmalang	0	8	115	0	7	120
10	Sragen	1	62	302	0	16	210
11	Sidoarjo	2	8	80	0	6	85
12	Tanon	0	2	53	0	2	44
13	Gemolong	1	4	55	0	9	49

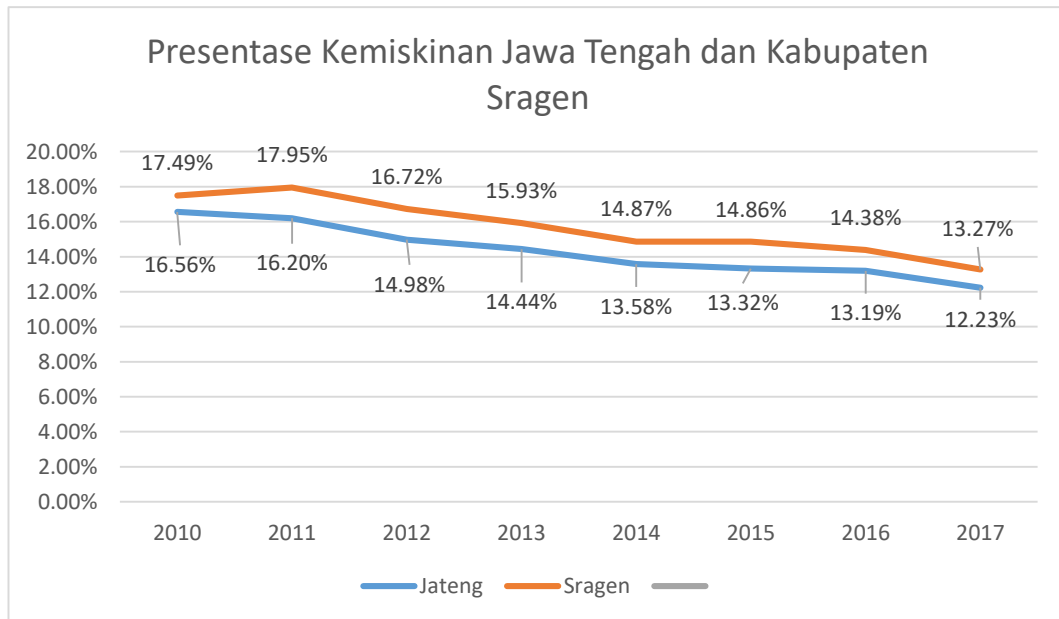
14	Miri	0	1	15	0	2	23
15	Sumberlawang	0	5	47	0	5	37
16	Sukodono	0	2	31	0	0	25
17	Mondokan	0	0	17	0	2	12
18	Gesi	0	1	32	0	0	26
19	Tangen	0	1	34	0	0	8
20	Jenar	0	0	28	0	0	22
	JUMLAH	6	147	1408	2	72	1182

Sumber BPS Kabupaten Sragen dalam dokumen Sragen Dalam Angka 2017

Dilihat dari data tabel diatas, bahwa UMKM di Kabupaten Sragen mengalami perubahan berupa kenaikan jumlah UMKM. Hal yang paling terlihat yakni adanya penambahan jumlah UMKM dari jenis usaha kecil yang terjadi di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Sragen.

Mengacu pada Undang Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Pembinaan yang merupakan program dalam pemberdayaan UMKM merupakan upaya dalam pengentasan kemiskinan. Perlu diketahui, bahwa tingkat kemiskinan yang ada di Kabpuaten Sragen sempat terletak dalam 10 besar dalam kemiskinan di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Sragen berharap dari adanya Peraturan Kabupaten Sragen tentang UMKM dapat berkontribusi dalam penurunan

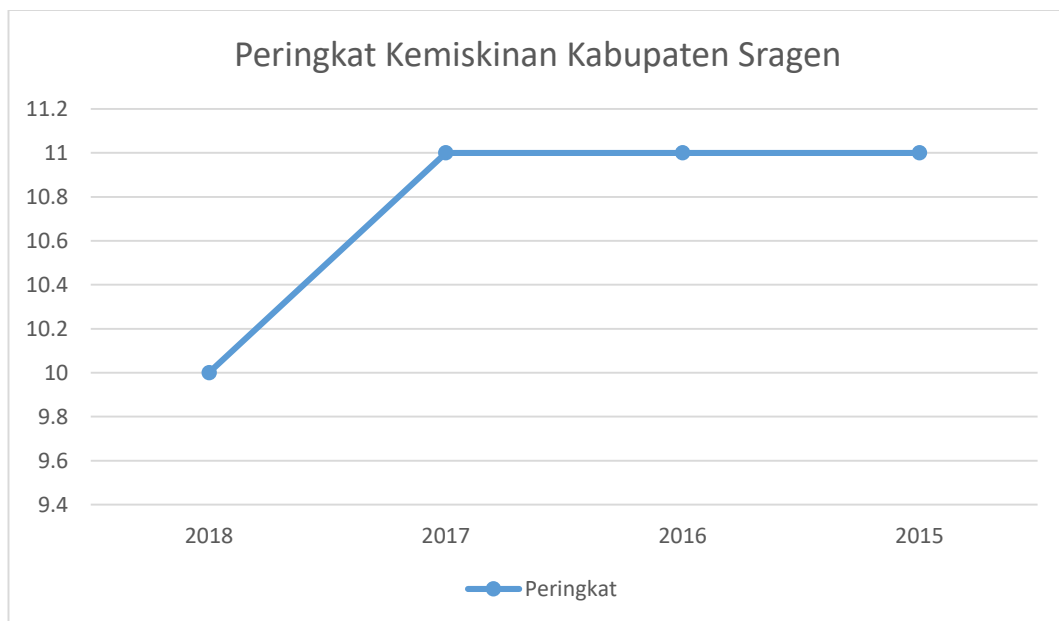
kemiskinan di Kabupaten Sragen.



Gambar 1. 1. Presentase Kemiskinan Jawa Tengah dan Kabupaten Sragen

Sumber BPS Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Sragen

(<https://jateng.bps.go.id/statictable/2016/08/25/1369/garis-kemiskinan-dan-penduduk-miskin-di-provinsi-jawa-tengah-2010-september2017.html> dan <https://sragenkab.bps.go.id/site/resultTab>)



Gambar 1. 2. Peringkat Kemiskinan Kabupaten Sragen

(Sumber ; BPS.go.id diolah oleh penulis)

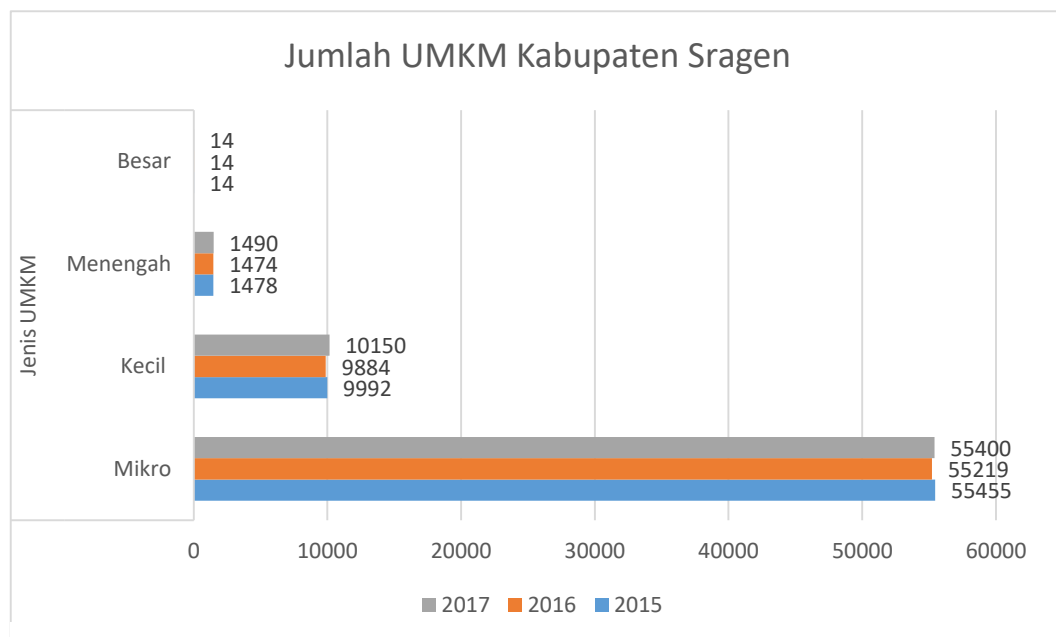
Demi menanggulangi kemiskinan, salah satu cara yakni melalui sektor UMKM. UMKM di Kabupaten Sragen sendiri, tidak hanya di dukung oleh Dinas Koperasi dan UMKM sendiri, namun terdapat implementor lainnya. Peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 3 tahun 2013 tentang UMKM, tepatnya pada pasal 14 disebutkan bahwa pembinaan UMKM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Institusi atau Lembaga lainnya baik dilakukan secara sendiri maupun bersama sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan. Mudah-mudahan, ketidak terikatan para implementor kebijakan dalam pelaksanaan pembinaan UMKM dapat membuat semakin baiknya program pembinaan serta dampak yang positif yang ditimbulkan. Berdasarkan Lestari, 2016 pada penelitian tentang UMKM di Kabupaten Kudus, selain adanya kesinambungan antar implementor, keseriusan dan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam memajukan UMKM di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diharapkan untuk lebih meningkatkan kemampuan Pemerintah bersama seluruh lapisan untuk mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi dan sumber-sumber daya yang ada, baik potensi sosial-ekonomi masyarakat, sumberdaya alam maupun bantuan Pemerintah. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, pada dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah telah menganggarkan kegiatan – kegiatan yang menunjang UMKM yang ada di kabupaten atau kota di Jawa Tengah, termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut antara lain :

- 1) Peningkatan kualitas manajerial sumber daya manusia koperasi dan UMKM dengan pagu indikatif 2019 pencermatan sebesar Rp3.150.000.000
- 2) Peningkatan Kapasitas Pembiayaan bagi KUKM dengan pagu indikatif 2019 pencermatan sebesar Rp500.000.000
- 3) Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau dengan pagu indikatif 2019 pencermatan sebesar Rp5.650.000.000

Bersumber dari fedepsragen.org, yaitu web yang dikelola oleh FEDEP (*Forum of Economic Development and Employment Promotion*) dibawah naungan pemerintah Kabupaten Sragen, Kecamatan Kedawung sendiri memiliki potensi pada kluster sapi brangus dan kluster rumah tangga. Dilihat dari aspek kelingkungan atau geospasial, di Kecamatan Kedawung memiliki kebun karet yang luas. Kecamatan Kedawung terletak di kaki gunung lawu yang memiliki wilayah kontur muka bumi yang tidak rata atau bergelombang yang menyebabkan lahan pertanian yang kurang subur. Disamping itu, Kedawung merupakan kecamatan yang berada pada sisi selatan Kabupaten Sragen yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar. Berasal dari sinilah, Kecamatan Kedawung cocok untuk UMKM Kluster rumah tangga. Klaster kedua yakni sapi brangus, bermula dari tahun 1981, pengembangan sapi brangus di Kabupaten Sragen sudah mulai dilakukan dan ditetapkan sebagai pusat pembibitan sapi brangus satu – satunya di Jawa Tengah.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen, dalam 3 tahun terakhir, UMKM di Kabupaten Sragen tergolong tinggi. Pada tahun 2015, jumlah UMKM yang ada sebanyak 66.939 unit, pada tahun 2016 sebanyak 66.591 unit, dan pada tahun 2017 jumlah UMKM yang ada sebanyak 67.054 unit. Rincian UMKM dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 1. 3. Jumlah UMKM Kabupaten Sragen

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen dalam Rekapitulasi Jumlah UMKM Kabupaten Sragen tahun 2015, 2016, 2017

Pada tahun 2017 Bappeda Litbang Kabupaten Sragen mengeluarkan dan mempublikasikan file presentasinya mengenai UMKM di Kabupaten Sragen. File tersebut menunjukkan bahwa dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen, terdapat 10 teratas yang memberi kontribusi *Product Domestic Regional Bruto*, adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 3. Peringkat 10 Teratas Kecamatan dalam Kontribusi PDRB

Peringkat	Kecamatan

1.	Sragen
2.	Sidoarjo
3.	Masaran
4.	Plupuh
5.	Kalijambe
6.	Gemolong
7.	Sambungmacan
8.	Karangmalang
9.	Sumberlawang
10.	Kedawung

Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Sragen tahun 2017 Dalam File Presentasi Berjudul “UMKM Pedesaan di Kabupaten Sragen”

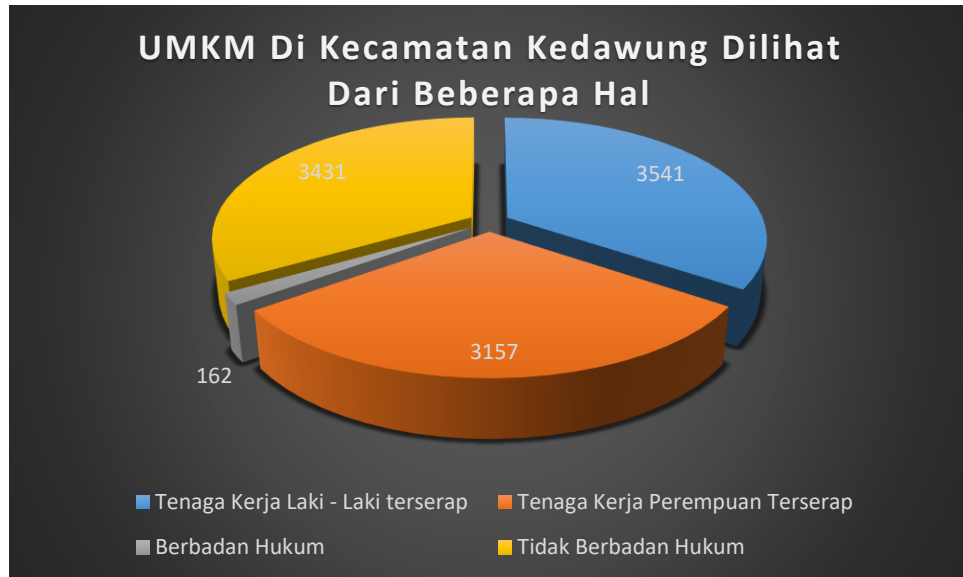
Kecamatan Kedawung berada di paling bawah dalam tabel tersebut, sebenarnya Kecamatan Kedawung memiliki potensi yang cukup bagus. Menurut Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang dimiliki Kabupaten Sragen, Bidang peternakan di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, cocok untuk ternak sapi, baik sapi potong, sapi kereman dan sapi penggemukan serta ternak kambing. Sementara, untuk bidang perikanan, sangat cocok terutama dikembangkan untuk ikan air tawar seperti gurame, nila, patin dan lele. Sedangkan komoditas hortikultura, Kecamatan Kedawung berpotensi untuk ditanami bawang merah,

cabe, melon, semangka dan padi. Beberapa wilayah di Kecamatan Kedawung sudah mengembangkan potensi tersebut, diantaranya di Desa Celep, Karangpelem, Jenggrik, Kedawung, Mojokerto, dan Mojodoyong. Hal yang paling mencolok di Kecamatan Kedawung, adalah keberadaan pohon karet yang cukup luas di Kecamatan tersebut. Berdasarkan Dokumen yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten, Spesifikasi UMKM yang ada di Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 4. Spesifikasi Sederhana UMKM di Kedawung

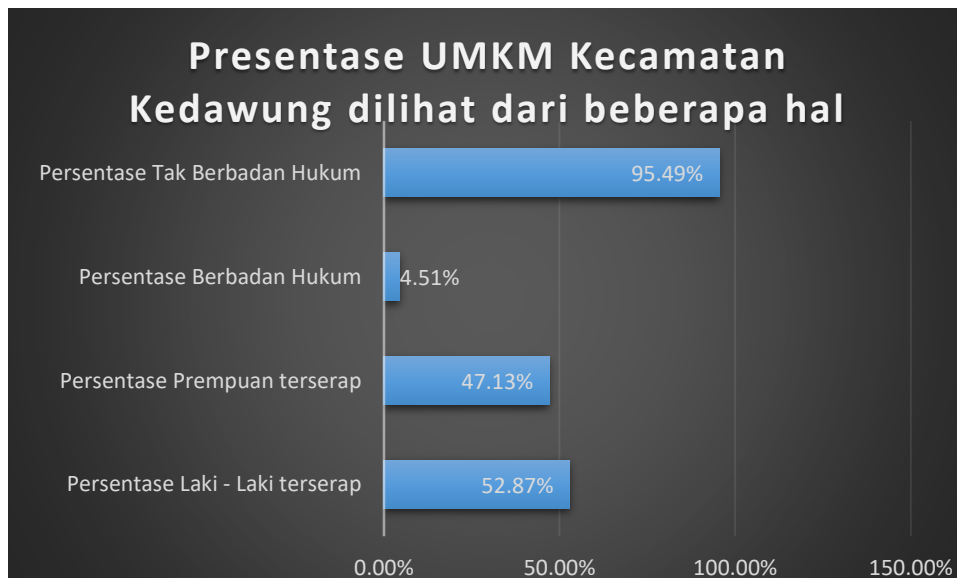
Spesifikasi	Angka
Tenaga Kerja Laki - Laki terserap	3541
Persentase Laki - Laki terserap	52.87%
Tenaga Kerja Perempuan Terserap	3157
Persentase Perempuan terserap	47.13%
Berbadan Hukum	162
Persentase Berbadan Hukum	4.51%
Tidak Berbadan Hukum	3431
Persentase Tak Berbadan Hukum	95.49%
Sektor Usaha Dominan	Perdagangan
Persentase Dominan	51.57%
Omzet Per Tahun	Rp170.809.852.000,00
Aset Per Tahun	Rp89.332.517.000,00

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen dalam dokumen
Pendataan UMKM Kecamatan Kedawung tahun 2016



Gambar 1. 4. UMKM Kecamatan Kedawung

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen dalam dokumen Pendataan UMKM
Kecamatan Kedawung tahun 2016



Gambar 1. 5. Persentase beberapa hal terkait UMKM di Kedawung

Sumber ; Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen dalam dokumen Pendataan UMKM
Kecamatan Kedawung tahun 2016

Perlu kita ketahui bahwa pendapatan total Kecamatan Kedawung yang berasal dari pendapatan pada tiap desanya cukup besar. Bersumber dari dokumen Kecamatan Kedawung dalam Angka 2018 yang dipublikasikan pada tanggal 26 September 2018, mencatat pendapatan total Kecamatan Kedawung sebesar Rp990.254.000 pada tahun 2017 dan 2016. Rp 1.088.900.000.

Masih dari sumber yang sama, jumlah yang dicatat mengenai industri yang ada di Kecamatan Kedawung adalah sebagai berikut

Tabel 1. 5. Jumlah Industri di Kecamatan Kedawung

Kategori	Tahun		
	2015	2016	2017
industri sedang	0	1	2
kecil	2	2	4
rumah tangga	321	329	336

(Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen)

Kecamatan Kedawung merupakan salah satu Kecamatan yang terbilang tidak jauh dengan pusat kabupaten, yakni 7 Kilometer. Pembinaan yang dilaksanakan setidaknya memberikan dampak yang positif. Ungkapan tersebut sejalan dengan pendapat Suharto yang menyatakan bahwa pendampingan sosial merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni membantu orang – orang agar mampu membantu dirinya sendiri (Suharto,2005).

Ungkapan Suharto diatas, perlu juga adanya peran antar stakeholder yang terkait pada sebuah wadah pemberdayaan dan pembinaan seperti pada UMKM. Izzah dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Stakeholders Dalam Proses Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Alas Kaki Unggulan Melalui Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) Di Kota Mojokerto”, menunjukkan bahwa adanya peran dari beberapa stakeholder dalam kegiatan atau program pemberdayaan UMKM. Peran – peran yang dikemukakan oleh Suharto, antara lain Peran Pemungkinan, Peran dalam penguatan, Peran dalam perlindungan, Peran dalam penyokongan, peran dalam pemeliharaan.

Peranan yang dikemukakan oleh Suharto tersebut, sedikit menggambarkan mengenai lokus penelitian, yakni berada di Kabupaten Sragen, yang didalamnya juga mencakup 3 aspek penting, yakni sektor privat, masyarakat dan pemerintah. Sektor privat yang terdapat di Kabupaen Sragen seperti BAZNAZ, atau LAZIZMU, Sekolah Bisnis Sragen (SBS) atau lembaga kemasyarakatan lainnya. Adanya forum forum yang mewadahi bidang klaster UMKM yang ada di Kabupaten Sragen, serta pihak pemerintah sendiri ada Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga tidak menutup kemungkinan juga berkaitan dengan SKPD lainnya.

Hal diatas menjadi titik penting ketika adanya pihak pihak yang berperan dalam pelaksanaan program pembinaan UMKM yang ada di Kabupaten Sragen yang sekilas memberikan dampak positif yang luar biasa. Namun pada kenyataannya, hanya beberapa yang memiliki prestasi yang lebih unggul dibandingkan dengan tempat lain. seperti semakin variatifnya UMKM, banyak

tenaga yang terserap, tingkat ketahanan UMKM yang paling tidak memberikan kekonsistenan atau lebih baik mengalami peningkatan, memicu untuk dapat lebih berkembang pada tahap yang lebih tinggi, atau pangsa pasar yang lebih luas, mulai menggunakan penetrasi teknologi.

Selain dari peranan dari beberapa pihak yang memberi pengaruh pada keberhasilan program, ada pula mengenai anggaran. Berdasarkan teori efektivitas, mengatakan bahwa efektivitas adalah keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Bercermin dari penelitian yang berjudul Anggaran Pendapatan, Realisasi Belanja, dan Efektivitas Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Suyanto dan Prihanto, 2014) menunjukkan hasil bahwa Pengalokasian anggaran dan penyerapan terhadap anggaran sangat menentukan efektivitas program yang dicanangkan pemerintah. Program pembinaan UMKM di Kabupaten Sragen merupakan salah satu bentuk program pemerintah daerah yang ditujukan kepada setiap pelaku dunia usaha UMKM. Ditambah lagi, dilansir dari media online Suaramerdeka.com menyebutkan bahwa Kepala Daerah Kabupaten Sragen mengusulkan dana 3 sampai 5 miliar rupiah di APBD untuk pengembangan usaha UMKM. Dilapangan, penganggaran sudah dilaksanakan oleh beberapa pihak seperti Bappeda, SKPD terkait yang ada di Kabupaten Sragen dan dimungkinkan pula terdapat sektor privat yang menganggarkan dana untuk keberhasilan di dunia UMKM khususnya yang ada di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Sehingga dari adanya upaya upaya yang sudah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya setidaknya juga memberikan dampak yang baik kepada objek kebijakan dari pemerintah daerah.

Sehingga dari adanya hal tersebut, penulis tertarik meneliti mengenai efektivitas pembinaan UMKM dan menganalisis dampak dari pembinaan berdasar perdakab tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas pembinaan terhadap UMKM di Kecamatan Kedawung?
2. Bagaimana dampak kebijakan pembinaan UMKM bagi pemilik usaha UMKM di Kecamatan Kedawung?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas pembinaan UMKM di Kecamatan Kedawung
2. Menganalisis dampak kebijakan pembinaan UMKM bagi perkembangan usaha UMKM di Kecamatan Kedawung

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Mengetahui berhasil tidaknya dan bagaimana dampak yang ada terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Sragen

2. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi berdasar hasil penelitian yang diperoleh agar kedepannya pemerintah dapat mengambil tindakan guna mengoptimisasi kinerja demi UMKM yang ada di Kabupaten Sragen

1.5. Kajian Teori

1.5.1. Paradigma Administrasi Publik

1. *Old Public Administration (OPA)*

Old Public Administration dilaksanakan dengan program publik dilaksanakan melalui organisasi hirarkis, dengan manajer yang menjalankan kontrol dari puncak organisasi. OPA memiliki Nilai utama : *legal and political standard* dan nilai ekonomi (efisiensi dan efektivitas). Administrasi publik sebagai penyedia layanan. Pelayanan publik secara langsung melalui badan-badan pemerintah -negara sebagai aktor utama (*Rowing*). Publik dianggap sebagai *client* atau pihak yang tergantung pada layanan negara. OPA memandang Manusia sbg makhluk mekanistik yang perlu diarahkan, dikendalikan dan dilayani.

2. *New Public Management (NPM)*

Birokrasi tidak mesti menjalankan sendiri tugas pelayanan publik, tetapi dapat melimpahkan tugas tersebut ke pihak lain melalui sistem kontrak atau swastanisasi. Publik sebagai "*customer*". Relasi birokrasi dan pengguna jasa dipahami sebagaimana transaksi bisnis. Publik pengguna layanan publik sebagai "*customer*" (konsep ekonomi liberal "*economic man*") yang tindakannya dimotivasi dorongan utk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan material

3. *New Public Service (NPS)*

NPS memiliki Tugas utama yaitu memberi pelayanan terbaik pada warga negara (*citizen*), bukan *customer*. Misi NPS yaitu mewujudkan kepentingan publik dan inti pelayanan publik adalah *Citizenship* bukan *entrepreneurship*. Prinsip-prinsip dan proses demokrasi lebih utama ketimbang kepentingan bisnis. Publik sebagai *citizen* atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama. *Citizen* adalah pengguna layanan publik dan juga subyek berbagai kewajiban

publik, karena itu, administrasi publik tidak hanya responsif pada *customer*, tapi juga pada pemenuhan hak-hak publik.

Penekanan penulis mengenai judul penelitian ini adalah pada paradigma NPS (*New Public Service*). Menurut penulis, paradigma ini masih memiliki relevansi yang tinggi dengan apa yang terjadi saat sekarang ini, dibanding dengan paradigma OPA dan NPM. Pemerintah memfokuskan pada apa yang diinginkan publik dan bukan berorientasi pada benefit.

Adanya keinginan publik sebagai *goal* dari kegiatan pemerintah agar mewujudkan pemerintahan yang baik secara teori dan praktek tidak terlepas dari apa yang dinamakan partisipasi. Partisipasi yang masuk digadang – gadang memiliki pengaruh arah, kearah manakah pemerintah bergerak sebaiknya, sehingga upaya untuk mencapai tujuan pemerintah itu tidak bias dan lebih parahnya dituding tidak memiliki arah.

1.5.2. Kebijakan Publik

Menurut Parker dalam Kusumanegara (Solahuddin, 2010) kebijakan publik merupakan suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subjek atau tanggapan kritis.

Edward dan Sharkansy mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah mencakup tujuan, maksud program pemerintah, pelaksanaan niat, dan peraturan.

Lester dan Stewart tahun 2000 menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh institusi otoritatif yang ditunjukkan dan berdampak kepada publik serta ditunjukkan untuk mengatasi persoalan publik.

Kebijakan publik memiliki 2 tipologi menurut Ripley pada tahun 1985,yaitu:

- 1) Tipe Kebijakan Domestik
 - 2) Tipe Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan
1. Tipe Kebijakan Domestik

- a. Kebijakan Distributif

Merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk mempromosikan aktivitas swasta yang menyangkut kepentingan orang banyak dan hanya bisa berjalan jika melibatkan peran pemerintah.

- b. Kebijakan Competitive regulatory (Kebijakan Pengaturan Pola Persaingan)

Kebijakan yang membatasi provisi barang dan pelayanan yang bersifat khusus kepada seorang atau sedikit orang yang melaksanakan program melalui kompetisi.

- c. Kebijakan Protective Regulatory (Kebijakan Pengaturan Perlindungan)

Kebijakan yang didesain untuk melindungi sektor publik dengan merancang kondisi dalam mana ditetapkan boleh tidaknya adanya aktifitas swasta

- d. Kebijakan Redistributif

Kebijakan yang mendistribusikan kembali akibat akibat buruk yang ditimbulkan dari upaya pencapaian kemakmuran, kebebasan sipil dan lain kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya.

Kebijakan Publik memiliki siklus dimana setiap disiplin ataupun sub disiplin memiliki ruang lingkupnya masing – masing. Secara ringkasnya dapat dibagi menjadi 3 tahap kebijakan publik

Adapun tahap tahap kebijakan publik menurut Lester, James P dan Stewart Jr Joseph pada tahun 2000 dalam bukunya yang berjudul *Public Policy : An Evolutionary Approach* Edisi Kedua yang dicantumkan pada buku Kusumanegara (Solahuddin, 2010)

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34 adalah sebagai berikut :

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Masing-masing alternatif dalam perumusan kebijakan bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (Leo Agustino, 2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (Tangkilisan, 2003) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Suharno (Suharno,2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan
- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (Suharno,2010: 24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan Substantif dan Kebijakan Prosedural

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

- b. Kebijakan Distributif dan Kebijakan Regulatori

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan Material dan Kebijakan Simbolik

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang Berhubungan dengan Barang Umum (*Public Goods*) dan Barang Privat (*Privat Goods*)

Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang ditujukan kepada objek kebijakan, baik seluruh atau kelompok masyarakat tertentu guna mengatasi permasalahan yang dihadapi baik dalam kurun waktu tertentu ataupun paten hingga adanya pembaharuan kebijakan akibat dinamisnya masalah yang dihadapi.

Pada studi ini, penulis menggunakan salah satu jenis dari empat kategori kebijakan yang dikemukakan oleh James Anderson, yaitu. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan kepada kelompok sasaran dari

suatu kebijakan atau program yang dicanangkan berupa sumber daya. Pemilihan ini karena proyeksi penulis dengan adanya regulasi mengenai pembinaan UMKM akan memberikan suatu manfaat pada sumber daya yang ada pada UMKM tersebut

1.5.3. Evaluasi Kebijakan

Menurut Anderson, Evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap implementasi (proses) dan akibat-akibat (dampak) kebijakan. Variasi evaluasi memusatkan pada pelaksanaan program atau kebijakan yang menitik fokus pada apakah program telah dilaksanakan secara apa adanya yang sesuai peraturan. Evaluasi sistematis memusatkan perhatiannya pada kesesuaian antara dampak dari program dengan kebutuhan publik, atau apakah dampak dari program telah menjawab masalah – masalah yang dihadapi publik. Adapun makna evaluasi menurut Ripley pada tahun 1985 terdapat 3 tipe, antara lain:

1. Evaluasi Proses

Adalah tipe evaluasi yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimanakah program berjalan. Evaluasi tipe ini disebut juga dengan evaluasi formatif

2. Evaluasi Dampak

Adalah tipe evaluasi yang menjawab pertanyaan apa yang telah dilakukan suatu program. Atau akibat apa yang terjadi dengan adanya suatu program atau kebijakan. Evaluasi tipe ini disebut juga dengan evaluasi summatif

3. Analisis Strategis

Berupaya menjawab pertanyaan seberapa jauh efektivitas program dalam mengatasi masalah sosial dibandingkan dengan program program lain untuk masalah yang sama.

Secara umum alasan dilaksanakannya evaluasi program (dalam Ihwan Mahmudi, CIPP: Suatu Model Evaluasi), yaitu:

1. Pemenuhan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi program
3. Mengukur pengaruh, efek sampingan program
4. Akuntabilitas pelaksanaan program
5. Akreditasi program
6. Alat mengontrol pelaksanaan program
7. Alat komunikasi dengan stakeholder program
8. Keputusan mengenai program
 - a. Diteruskan
 - b. Dilaksanakan di tempat lain
 - c. Diubah
 - d. Dihentikan

Salah satu model evaluasi yang banyak digunakan adalah model CIPP (*Context – input – process – product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model CIPP melihat kepada empat dimensi yaitu dimensi Konteks, dimensi Input, dimensi Proses dan dimensi Produk. Masih dalam buku Kusumanegara tahun 2010 (Solahuddin, 2010), menjelaskan bahwa evaluasi implementasi adalah :

1. Meliputi Evaluasi Proses

2. Menjawab pertanyaan – pertanyaan perspektif *what happen*, dan tidak sekedar perspektif kompilasi komplians
3. Dapat dialamatkan pada *short-run* evaluasi dampak (dampak yang ditimbulkan suatu kebijakan atau program yang belum lama berjalan)

Ripley juga menyimpulkan mengenai evaluasi implementasi yang berisi :

1. Deskripsi apa inputnya melalui proses yang bagaimana dan apa outputnya atau akibat – akibat *short-run program*
2. Memberi preskripsi dalam bentuk pernyataan – pernyataan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi apakah yang dapat atau tidak dapat dimanipulasi oleh pembuat
3. Memberi eksplanasi mengenai pola hubungan antar variabel yang diamati dalam bentuk hubungan kausal

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut menurut Subarsono dalam bukunya (Subarsono,2010) antara lain :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Mengevaluasi dapat diketahui beberapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur beberapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijaka, baik dampak positif maupun negatif.

5. Mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Subarsono juga menjabarkan argumen mengenai perlunya mengadakan suatu evaluasi antara lain :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya
2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal
3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah
4. Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan, para stakeholders, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program
5. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan

yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Adanya evaluasi diharap menjadikan suatu kebijakan yang nantinya dibuat menjadi semakin baik.

William N Dunn menjabarkan mengenai Sifat evaluasi dalam bukunya, terdapat 4 sifat evaluasi kebijakan, antara lain :

1. Fokus Nilai

Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karenak ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran misal dalam hal ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan

2. Interdependensi fakta-nilai

Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah, diperlukan tidak hanya hasil kebijakan, namun juga harus didukung oleh bukti bukti bahwa hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Maka, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

3. Orientasi masa kini dan masa lampau

Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi – aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi dilakukan

4. Dualitas Nilai

Nilai – nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intrinsik, diperlukan bagi dirinya ataupun ekstrinsik yang diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan – tujuan lain.

Fungsi dari evaluasi sendiri yakni pertama, memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan politik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Adapun kriteria yang dijabarkan dalam tabel oleh William N Dunn adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 6. Kriteria Evaluasi dalam Dunn

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk	Unit biaya Manfaat Bersih Rasio biaya – manfaat

	mencapai hasil yang diinginkan?	
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah	Biaya tetap (tipe masalah I) Efektivitas tetap (tipe masalah II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda	Kriteria Pareto Kriteria Kaldor – Hicks Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan benar – benar berguna atau bernilai	Program publik harus merata dan efisien
Kriteria Evaluasi Dalam William N Dunn Edisi Kedua		

Sumber;William Dunn,2003

Selain keenam kriteria yang disampaikan diatas, Langbien (1980) dalam Subarsono (Subarsono ,2013), juga menjelaskan mengenai indikator keberhasilan program – program publik yang terdiri dari tiga, indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 7. Indikator Hasil Program atau Kebijakan Publik

No	Indikator	Sub-Indikator
----	-----------	---------------

1.	Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Produktivitas sumberdaya
2.	Keadilan Distribusi	Peningkatan Efisiensi Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan barang non privat - Penyediaan informasi - Pengurangan resiko - Memperluas akses masuk pasar
3.	Preferensi warga negara	<ul style="list-style-type: none"> - Kepuasan warga negara - Seberapa jauh preferensi masyarakat termuat dalam kebijakan publik

Sumber : Subarsono,2013

William N Dunn selain menjabarkan kriteria dalam evaluasi kebijakan, juga terdapat teknik yang digunakan dalam evaluasi kebijakan yang juga ditulis dalam bukunya, teknik dalam evaluasi kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 8. Pendekatan Evaluasi

Pendekatan	Teknik
Evaluasi Semu	Sajian Grafik Tampilan tabel Angka Indeks Analisis seri waktu terinterupsi Analisis seri terkontrol Analisis diskontinyu – regresi
Evaluasi Formal	Pemetaan sasaran Klarifikasi nilai Kritik Nilai Pemetaan hambatan Analisis dampak – silang Diskonting
Evaluasi Keputusan Teoritis	Brainstroming Analisis argumentasi Delphi Kebijakan Analisa survey pemakai

Sumber ; William Dunn, 2003

Edward A. Schuman mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan,

yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan Standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Untuk mengetahui apakah kebijakan sudah mengubah perilaku dan kondisi sosial, Lester dan Stewart menyarankan menggunakan sejumlah desain penelitian untuk menunjang evaluasi kebijakan, antara lain :

1. Desain *Preexperimental*

Mengarahkan studi pada langkah analisis secara intersif terhadap “apa yang terjadi” selama implementasi berlangsung, setelah implementasi dan mencoba menetapkan apakah telah terjadi perubahan tingkah laku dan kondisi sosial. Desain tipe ini terfokus pada satu kelompok, satu peristiwa, atau satu fenomena pada waktu tertentu tanpa mempertimbangkan efek samping. Disamping itu, desain ini mengarahkan pada bentuk studi *before and after*, yaitu terfokus pada keadaan kelompok target sebelum dan beberapa waktu setelah implementasi kebijakan.

2. Desain *True Experiment*

Merupakan desain penelitian klasik yang mengarahkan perhatian pada kelompok kontrol (kelompok pembanding) dan kelompok eksperimen yang dipilih secara random. Perubahan yang terjadi dalam dua kelompok dibandingkan sebelum dan sesudah pelaksanaan program

3. Desain Quasi- Experimental

Hampir seperti pada desain *True Experiment*, namun yang memberi perbedaan yakni pada pemilihan kelompok yang dipilih tidak secara random,

namun pemilihan kelompok yakni dengan mempertimbangkan “kesamaan” sehingga perbandingan dua kelompok dianggap valid

4. Desain Model Kausal

Alat utama dalam model ini yakni analisis regresi. Evaluator dituntut untuk mengkonstruksi model matematik dari profram dan dampaknya. Sebagaimana pada penelitian survey, evaluator menyusun asumsi – asumsi, *output* program dan hasilnya, serta menetapkan faktor yang dianggap sebagai penyebab *outcomes* kebijakan

Pandangan penulis dalam menyikapi fokus penelitian, yakni Evaluasi Dampak Kebijakan dari adanya pembinaan memperhatikan beberapa hal terkait landasan teori diatas. Evaluasi dampak yang disebutkan oleh Ripley dalam tipe evaluasi menyebutkan bahwa evaluasi dampak merupakan suatu upaya untuk mengetahui mengenai apa yang dilakukan suatu program pembinaan. Solahudin dalam Kusumanegara juga menjelaskan bahwa evaluasi implementasi diantaranya meliputi evaluasi proses, menjawab pertanyaan “apa yang terjadi (*what happen*)” dan dapat dialamatkan kepada evaluasi dampak. Selanjutnya, Ihwan Mahmudi menyebutkan bahwa alasan dilaksanakannya suatu evaluasi diantaranya adalah mengukur efektivitas suatu program serta mengukur pengaruh dari program pembinaan. Disini mengenai upaya yang dilakukan oleh program pembinaan tertuang dalam regulasi, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tentang UMKM perlu dikaji guna mengetahui efek apa yang ditimbulkan dari adanya program tersebut.

1.5.4. Metode Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi memiliki metode yang perlu digunakan, Finsterbusch dan Motz (Subarsono,2013) menjelaskan terdapat 4 metode dalam evaluasi kebijakan, metode tersebut yakni :

Tabel 1. 9. Metode Evaluasi

Jenis evaluasi	Pengukuran Kondisi		Kelompok Kontrol	Informasi yang diperoleh
	Sebelum	Sesudah		
<i>Single Program After Only</i>	Tidak	Ya	Tidak Ada	Keadilan kelompok sasaran
<i>Single Program Before-After</i>	Ya	Ya	Tidak Ada	Perubahan Kelompok sasaran
<i>Comparative After-only</i>	Tidak	Ya	Ada	Kedudukan kelompok sasaran dan kelompok kontrol
<i>Comparative Before-After</i>	Ya	Ya	Ada	Efek program terhadap kelompok sasaran dan kelompok sasaran

Sumber Finsterbusch dan Motz 1980 dalam Subarsono,2013

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik dimana aktor kebijakan publik berusaha mengamati keberjalanan, keefektifan, dan keberhasilan program atau kebijakan dalam memecahkan masalah atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat

Indikator hasil kebijakan sebagai landasan dalam evaluasi yang kami gunakan disini berfokus pada 3 indikator yang dikemukakan oleh Langbien dalam Subarsono yang mana indikator tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, keadilan distribusi dan preferensi warga negara. Hal ini dikarenakan adanya perkiraan bahwa dampak yang nantinya muncul dari adanya program terhadap ekonomi kerakyatan ini tentu secara jelas berdampak pada faktor perekonomian, namun juga tidak menutup kemungkinan adanya dampak lain yang timbul selain dari faktor ekonomi.

Desain evaluasi kebijakan. Desain evaluasi kebijakan yang digunakan oleh penulis menggunakan *preexperimental*, dimana desain ini menekankan pada objek penelitian yang akan dianalisis secara intersif terhadap “apa yang terjadi” selama implementasi berlangsung, setelah implementasi dan mencoba menetapkan apakah telah terjadi perubahan. Namun prakiraan dilapangan, akan terjadi proses modifikasi karena pada mulanya desain ini mengarahkan pada model evaluasi *before after program* yang memerlukan data cukup jauh kebelakang sebelum adanya kebijakan dikeluarkan. Sehingga metode penelitian diubah kearah *single program after only*.

1.5.5. Evaluasi Proses

Evaluasi proses menurut R. Ripley adalah tipe evaluasi yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimanakah program berjalan. Evaluasi tipe ini disebut juga dengan evaluasi formatif. Berkaitan dengan “bagaimanakah program berjalan” menurut Ripley, Kusumanegara menggunakan istilah evaluasi Implementasi,

Kusumanegara tahun 2010 (Solahuddin, 2010), menjelaskan bahwa evaluasi implementasi adalah :

1. Meliputi Evaluasi Proses
2. Menjawab pertanyaan – pertanyaan perspektif *what happen*, dan tidak sekedar perspektif kompilasi komplians
3. Dapat dialamatkan pada short-run evaluasi dampak (dampak yang ditimbulkan suatu kebijakan atau program yang belum lama berjalan)

Mahmudi menyebutkan bahwa alasan dilaksanakannya evaluasi program diantaranya adalah mengukur efektivitas dari program yang dilaksanakan. Untuk mengukur efektivitas dari kebijakan, salah satu literasi yang dapat digunakan adalah 5 tepat yang dikemukakan oleh Riant Nugroho. Riant (Riant Nugroho , 2012: 707-710) mengemukakan bahwa terdapat lima “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan :

1. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan.

2. Tepat Pelaksana

Berkaitan dengan Implementator dari kebijakan, yakni pemerintah, kerjasama antar pemerintah, dan masyarakat, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.

3. Tepat Target

Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya

4. Tepat Lingkungan

Lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi diantar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan

5. Tepat Proses

Secara umum implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu :

- a. *Policy Acceptance* disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan
- b. *Policy Adoption* disini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan
- c. *Strategic Readiness* disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan. Disisi lain birokrat on the street (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

Menurut penulis, dalam efektivitas kebijakan pembinaan UMKM perlu adanya integrasi antara lima “tepat” yang dikemukakan oleh Riant Nugroho. Keefektifan implementasi langsung dengan apa yang dinamakan usaha dengan hasil yang dicapai. Disini, penulis menggunakan Teori 5 tepat dari Riant Nugroho antara lain tepat kebijakan, tepat proses, tepat lingkungan, tepat target, dan tepat pelaksana. Lima tepat ini berkaitan dengan prinsip *triple helix* dimana peranan swasta, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan disini demi mencapai tujuan bersama.

Keefektifan regulasi yang ada, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 3 tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 10. Integrasi Teori dengan Regulasi

Nomor	Keefektifan Implementasi
	<u>Tepat Kebijakan</u>
1	Pemberian penyuluhan
2	adanya pelatihan
3	Peningkatan kompetensi dan kapasitas dalam bidang manajemen dan pengembangan teknologi
4	Pembuatan panduan pengembangan
5	Pendampingan
6	pemberian advokasi hukum dan pembelaan kesempatan berusaha
	<u>Tepat Target</u>
1	Kesiapan pelaku UMKM dalam pelaksanaan pembinaan UMKM
2	Respon berupa pelaksanaan kegiatan UMKM dengan tidak bertentangan dengan peraturan, melayani konsumen dengan sebaik mungkin, pemberian informasi secara jujur kepada konsumen, melakukan usaha ditempat yang sudah ditetapkan dan diijinkan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup
	<u>Tepat Pelaksana</u>
1	Peran pemerintah melalui SKPD terkait atau langsung oleh pemerintah daerah
2	Peran Swasta
3	Kerjasama Pemerintah dengan Swasta
	<u>Tepat Lingkungan</u>
1	Koordinasi antar SKPD atau dengan Swasta
2	Pendapat pelaku UMKM sebagai masukan
	<u>Tepat Proses</u>
1	Pemahaman kebijakan oleh Implementor yakni SKPD dan swasta
2	Penerimaan kebijakan sebagai tugas bersama
3	Kesiapan kebijakan oleh Implementor yakni dari pihak pemerintah di kabupaten beserta pemerintah di bawahnya dan pihak swasta

(Sumber ; Diolah oleh penulis)

1.5.6. Evaluasi Dampak

Evaluasi Dampak menurut Ripley yaitu tipe evaluasi yang menjawab pertanyaan apa yang telah dilakukan suatu program. Atau akibat apa yang terjadi dengan adanya suatu program atau kebijakan. Evaluasi tipe ini disebut juga dengan evaluasi summatif. Lebih khusus mengenai evaluasi dampak sebagaimana

dijelaskan oleh Wirawan dalam publikasi Jurnal Borneo Administrator Volume 13 Nomor 1 Tahun 2017, bahwa evaluasi dampak (*outcome*) merupakan evaluasi sumatif yaitu mengukur dan menilai keluaran akibat atau pengaruh dari program (Wirawan,2011)

Secara konseptual, studi evaluasi implementasi dalam beberapa hal dapat tumpang tindih dengan studi evaluasi dampak. Mengevaluasi dampak short-run adalah bagian integral dari evaluasi implementasi. Untuk mengetahui mengenai makna dampak., suatu konsepsi mulai menjawab suatu pertanyaan “apa yang terjadi dengan adanya suatu program?”, dibuatlah suatu asumsi yaitu pengukuran “apakah program berhasil memecahkan permasalahan sosial” termasuk didalamnya berkaitan dengan pengukuran dari segi ekonomi. Pengukuran ekonomu digunakan untuk mengetahui keuntungan apa saja yang diraih oleh individu atau kelompok. Ada empat dimensi utama dari dampak yang perlu diperhatikan menurut Ripley, yaitu :

1. Waktu
2. Keterkaitan antara dampak yang aktual dengan bakal dampak
3. Tingkat agregatif dampak
4. Tipe – tipe dampak

1. Waktu

Kajian terhadap dimensi waktu dipandang sangat penting dalam analisis dampak. Semakin lama periode *post initiator* (periode setelah permulaan adanya dampak) dipelajari, semakin sulit untuk mengukur dampak karena rantai kausalitas semakin kabur dan sejumlah pengaruh dari faktor – faktor lain yang

akan dijelaskan semakin bertambah banyak. Maka, akan timbul suatu permasalahan praktis yaitu menjaga jejak data individu yang sama dalam waktu yang lama. Untuk itu, perlu ditentukan jangka waktu suatu penelitian

2. Hubungan dampak aktual dengan bakal dampak

Analisis dampak memerlukan perhatian tidak sekedar pada derajat pencapaian program dan apa yang bakal dicapai, tetapi juga pada akibat apa yang terjadi jika program hanya tercapai sebagian saja atau bahkan tidak tercapai sama sekali.

Sulit mengetahui perkiraan bakal dampak apa yang timbul, bisa jadi yang ditimbulkan malah bertentangan arah dengan dampak aktual

3. Tingkat agregasi dampak

Dampak suatu program terhadap individu dapat dipelajari, dan dampak tingkat individual ini dapat diagregasikan, dirata –rata dan dianalisis dengan berbagai cara untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada unit yang lebih luas dari individu, tetapi kelompok – kelompok yang besar dalam masyarakat atau masyarakat itu sendiri secara keseluruhan adalah merupakan subjek dari dampak itu sendiri dan dapat dipelajari secara langsung oleh para analis

4. Tipe – tipe dampak

Ada 4 tipe dampak dari program – program domestik yang dapat diuji oleh para ilmuwan. Yaitu :

1. Dampak pada kehidupan ekonomi
2. Dampak pada proses pembuatan keputusan
3. Dampak pada sikap – sikap publik seperti dukungan pada sistem politik

4. Dampak pada kualitas kehidupan

Evaluasi dampak dan juga evaluasi implementasi sejatinya dapat dilakukan baik setelah maupun sebelum kebijakan diimplementasikan, dimana evaluasi yang dilakukan sebelum kebijakan berlangsung disebut “*analisis*” atau “*assessment*”. Analisis terhadap dampak sosial, umum disebut sebagai “analisa dampak sosial”. atau ADS. Tetapi perlu diingat bahwa kerangka pikir ADS dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi dampak pada saat program sedang dijalankan maupun telah diakhiri (Samodra Wibawa, 1994). Menurut Samodra Wibawa langkah-langkah ADS yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan yang akan dianalisis
2. Pendeskripsian dampak sosial dari kebijakan tersebut.

Dalam hal ini, ada dua kategori yang harus dianalisis yakni: unit pedampak dalam arti unit sosial yang terkena dampak (pedampak) dan jenis atau aspek dampak dalam arti bidang kehidupan yang terkena dampak. Unit dampak terdiri dari individu dan keluarga, masyarakat. Sementara aspek dampak meliputi ekonomi, politik, sosial (dalam arti sempit), budaya, lingkungan dan fisik.

3. Menentukan respon individu maupun kelompok yang menjadi unit dampak.
4. Penyesuaian kebijakan
5. Kesimpulan dan rekomendasi

Menurut Finterbusch and Motz dalam Samodra Wibawa, di dalam evaluasi juga terdapat unit sosial yang dapat terkena dampak kebijakan (Samodra Wibawa, 1994 : 53-59), antara lain :

1. Dampak individu

1) Dampak Biologis atau Psikis

Dampak biologis atau psikis biasanya menyangkut persoalan penyakit, cacat fisik dan kekurangan gizi. Sedangkan dampak psikis berupa :

- a. Alienasi adalah hilangnya kelekatan (identitas) psikologis individu terhadap kelompok, pemerintah atau unit sosial lain
- b. Stress, terjadi jika dalam suatu proyek pembangunan para individu tidak mampu menolak dan tidak memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakan yang berakibat pada timbulnya perasaan powerlessness. Stress menunjukkan pada setiap respon terhadap dampak proyek yang dimaksud maupun tidak dimaksud untuk meningkatkan kualitas hidup mereka
- c. Depresi, merupakan respon negatif kualitas terhadap suatu proyek.

2) Dampak Lingkungan

Dampak Lingkungan adalah dampak yang sangat sulit dinilai dengan uang, misalnya keharusan seseorang pindah dari lingkungannya karena adanya suatu proyek.

3) Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi tidak saha menyentuh para pekerja, melainkan para pemilik modal bahkan konsumen. dampak ekonomi terhadap para pekerja dapat berupa naik turunnya pendapatan masyarakat karena kondisi mereka berubah,

sementara para pemilik modal naik turunnya laba yang mereka peroleh dan terhadap konsumen yaitu naik turunnya harga serta kualitas yang mereka dapat. Dampak ekonomi dijelaskan oleh Stynes (dalam Disbudpar Banten, 2013 : 20) dikelompokkan dalam tiga indikator ;

- (1) *direct effect* (Dampak Langsung) meliputi penjualan, kesempatan kerja, pendapatan pajak, dan tingkat pendapatan,
- (2) *indirect effect* (Dampak Tidak Langsung) meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu dan jumlah barang dan jasa, perubahan dalam penyediaan properti dan variasi, pajak, serta perubahan sosial dan lingkungan,
- (3) *induced effects* (Dampak yang Dipaksa), yaitu pengeluaran rumah tangga, dan peningkatan pendapatan.

4) Dampak Sosial dan Personal

Dampak sosial dan personal memiliki banyak dimensi yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. 11. Dampak Sosial dan Personal Bagi Individu

Posisi Individu	Jenis Dampak
Teman	Intensitas cinta , pergaulan
Anggota organisasi	Kuantitas dan Kualitas Kegiatan Organisasi

Turis	Kenyamanan, keamanan, kemudahan dan kesantiaian
Warga Negara	Kebebasan berpendapat, berkumpul dan berpergian
Wanita	Peningkatan kesibukan diluar rumah
Umum	Pendidikan, Kebudayaan, religius/spiritual, kreatifitas dan cultural shock

Sumber ; Samodra Wibawa (1994)

2. Dampak organisasional

Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak. Dampak dapat berupa terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan. Sedangkan dampak tidak langsung melalui peningkatan semangat kerja organisasi – organisasi.

3. Dampak Terhadap Masyarakat

Masyarakat bukanlah unit sosial yang goal-oriented seperti organisasi, oleh karena itu dampak tergadap kebijakan masyarakt menunjuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya.

4. Dampak Sosial Budaya

Kebijakan yang dimaksud tidak hanya untuk mengubah atau mempengaruhi lembaga lembaga, melainkan kebijakan tersebut akan mempengaruhi berbagai dimensi sosial yang lain. Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam sistem sosial merupakan akibat dari banyak faktor, bukan hanya merupakan akibat atau dampak dari sebuah kebijakan. Menurut Hary Hermawan dalam publikasinya yang berjudul “Dampak Sosial Budaya Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran” pada tahun 2016, menyebutkan bahwa indikator dalam analisis kualitatif dampak sosial budaya adalah :

1. Dampak terhadap struktur populasi
2. Dampak terhadap struktur mata pencaharian
3. Dampak terhadap transformasi tata nilai atau hubungan antar masyarakat
4. Dampak terhadap kehidupan sehari hari
5. Pola pembagian kerja masyarakat
6. Dampak terhadap kelangsungan kebudayaan lokal
7. Dampak terhadap benda – benda aset budaya

1.5.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan kontribusi masukan demi menambah kualitas pada karya tulis ilmiah ini dan juga penulis sendiri. Pertama penelitian terdahulu yang berjudul “Dampak Program Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil dan Menengah” oleh Achma Hendra dan Tri Wahyu Rejekiningsih pada tahun 2009. (Setiawan & Rejekiningsih, 2009). Penelitian ini bermaksud untuk menyediakan informasi tentang manfaat atas penerimaan dana bergulir bagi UKM dan mengetahui seberapa

besar dampak program tersebut. Hasil yang diperoleh pada penelitian tersebut yakni program tersebut mampu menambah jumlah tenaga kerja, modal usaha, omset penjualan, dan keuntungan. Dari keempat variabel tersebut, pada variabel tenaga kerja mendapat dampak yang paling besar. Selain itu, diketahui bahwa dana bergulir dan bantuan dana perkuatan berimplikasi positif terhadap penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Terkait pada penulisan karya ilmiah ini, bahwa pertama, penulis mengasumsikan bahwa kemajuan UMKM tidak sekedar melalui tahap pembinaan. Kedua, dalam jurnal tersebut, dikomparasikan dengan teori analisis dampak sosial oleh samodra wibawa yang saya, penulis, jurnal tersebut mengarah pada dampak pada sisi perekonomian. Dikatakan bahwa tenaga kerja yang bertambah sejajar dengan adanya dampak positif pada perekonomian individu terkait.

Kedua, pada skripsi yang dipublikasikan dengan judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kudus” oleh Putri Lestari, Universitas Diponegoro tahun 2016 (Putri Lestari, 2016). Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa, Pertama, pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Pemkab Kudus terdapat 3 tahapan; tahap satu, pencerahan untuk diberikan motivasi dan semangat dalam melakukan usaha. Tahap dua, pengkapasitasan yaitu berupa capacity building atau memampukan baik individu maupun kelompok UMKM yang dilakukan dengan berbagai pelatihan, sosialisasi, pengelompokkan dan pembuatan regulasi atau aturan. Tahap tiga adalah pendayaan atau pemberian daya dimana pelaku UMKM diberikan otoritas atau wewenang untuk melakukan kegiatan

UMKM sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya baik kemampuan SDM, ketrampilan maupun anggaran. Kedua Implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM yang ada pada kabupaten Kudus sudah berjalan baik, namun pelaksanaan belum dapat menjangkau seluruh UMKM di kabupaten Kudus. Ketiga, Komitmen tinggi pemkab namun tidak dibarengi anggaran yang sepadan sehingga masih banyak UMKM yang belum diberdayakan.

Terkait pada Teori ADS oleh Samudra Wibawa , Penelitian tersebut dapat megarah pada dampak Individual dan dampak pada lembaga. Dikatakan pada jurnal tersebut bahwa masih ada UMKM yang belum dijangkau oleh program tersebut sehingga dapat meberikan dampak pada individual seperti dampak psikisnya yang dapat memicu keirian dan dampak pada lembaganya yaitu masyarakat menjadi kurang percaya dengan program yang dilaksanakan

Ketiga, jurnal yang berjudul “*The Impact of Entrepreneurship Education on the Establishment and Survival of Small, Micro, and Medium Enterprises*” oleh Tendai Chimucheka. Jurnal ini berupaya mengetahui apakah edukasi kewirausahaan memberi peran terhadap pembentukan dan ketahanan hidup UMKM di Afrika Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Hasil yang didapatkan bahwa edukasi kewirausahaan berperan dalam pembentukan dan ketahanan hidup sebuah UMKM. Kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan yakni terletak pada implementasi dari program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pelaku UMKM di Kecamatan melalui SKPD yang terkait di dalamnya. Mirip dengan program yang diberikan, Pemerintah Daerah memberikan modal immateriil dalam bentuk pelatihan usaha bahkan dengan mengikutsertakan

teknologi di dalamnya. Program yang dilaksanakan harapannya memberikan dampak positif, seperti keberlangsungan usaha, bagi UMKM yang ada di lingkungan kecamatan dan bahkan lingkungan Kabupaten. Namun Implementasi yang dilaksanakan diperkirakan ada hambatan. Terdapat indikasi masalah pada implementasinya yakni adanya penurunan kuantitas UMKM yang ada di lapangan.

Keempat, Jurnal yang berjudul “*online marketing place for Indonesian micro small and medium enterprises based on social media*” oleh Ahmad Anshorimuslim Syuhada dan Windy Gambetta, Institut Teknologi Bandung yang dipublikasikan Elsevier pada *procedia technology* tahun 2013 (Syuhada & Gambett, 2013) Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM dalam melaksanakan pemasarannya, menggunakan media sosial seperti facebook dan market place lokal seperti bukalapak atau semacamnya. Jika disandingkan dengan regulasi pembinaan oleh pemkab Sragen, tentu hal ini relevan dan terkesan mengikuti arus dinamika gaya hidup masyarakat indonesia yang mulai menerapkan digitalisasi. Disamping itu, untuk menciptakan kepercayaan masyarakat agar dapat memasarkan produk UMKM, penjual juga menyantumkan suatu testimoni serta penyebaran melalui perekomendasi kepada calon pembeli lainnya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kepada pelaku UMKM selaku produsen. Pertama, terkait dengan apa yang akan dilaksanakan penulis, bahwa dalam regulasi Perdakab Sragen nomor 3 tahun 2013 bahwa pembinaan juga memperhatikan penetrasi teknologi. Ini menunjukkan adanya keterkaitan antara lembaga atau dinas sebagai implementor, proses mencapai efektivitas, dan dampaknya kedepan. Kedua, disandingkan dengan

teori ADS oleh Samodra Wibawa, jurnal tersebut menunjukkan bahwa berhasil tidaknya program akan berdampak pada lembaganya, yaitu tingkat kepercayaan.

Kelima, Jurnal Penelitian yang berjudul “Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang” oleh Sri Suwitri, Dewi Rostyaningsih dan Stephani Nora, Departemen Administrasi Publik, Fisip, Universitas Diponegoro yang dipublikasikan pada *ejournal3.undip.ac.id* pada tahun 2015. (Tahalea, Suwitri, Rostyaningsih, Publik, & Diponegoro, 2015) Hasil penelitian tersebut bahwa dampak individual yakni memperoleh kemudahan dalam mengurus ijin usaha walaupun masih ada kemoloran dalam penerbitan dokumen ijin, dan masih adanya pengusaha yang belum memperhatikan lingkungan sekitarnya seperti dalam hal pengelolaan limbah. Untuk dampak organisasionalnya yakni salah satunya masyarakat yang belum mengetahui kemudahan perijinan lebih memilih membuat dokumen ijin palsu yang merugikan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Walaupun lokus penelitian, namun hal yang digaris bawahi disini yakni pada “Evaluasi Dampak” nya. Pada jurnal ini, peneliti menaruh kerangka teori yang sama yakni mengenai evaluasi kebijakan dan evaluasi dampak. Peneliti tersebut dalam meneliti tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menggunakan indikator evaluasi dampak yakni berkaitan tentang teori dampak yang diharapkan oleh langbien dalam ripley dan yang tidak diharapkan mencakup dampak individual, dampak organisasional, dampak terhadap lembaga dan sistem sosial oleh samudra wibawa. Hampir sama oleh peneliti tersebut, saya selaku peneliti tentang UMKM menggunakan teori yang disampaikan oleh samudra Wibawa,

Pertama yakni dampak Individual mencakup aspek dampak ekonomi dan dampak sosial serta. Perbedaan pada penggunaan dampak individual, dimana saya, penulis, menggunakan dampak psikis, sedangkan pada jurnal tersebut tidak menggunakannya.

Keenam, Penelitian yang berjudul “Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang” oleh Ridwan, Hartutiningsih dan Hatuwe, Administrasi Negara, FISIP Universitas Mulawarman Samarinda yang dipublikasikan pada tahun 2014 melalui *e-journals.unmul.ac.id*. (Ridwan & Hartutiningsih & Hatuwe, 2014) Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang pembinaan industri Kecil dan Menengah di Kota Bontang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang secara umum sudah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat terhadap pengembangan usaha pelaku IKM, namun secara aplikatif namun hasil yang dicapai belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal. Kontribusi Penelitian ini kepada saya, pertama, yakni sebagai suatu muatan konklusi tentang konsepsi pembinaan dengan UMKM, sehingga ada gambaran yang nyata dilapangan mengenai pembinaan yang dilakukan demi mencapai suatu tujuan. Kedua, bahwa proses efektivitas berpengaruh pada dampaknya nanti, menurut hemat penulis, bahwa proyeksi kedepan bahwa proses efektivitas tersebut akan berdampak secara merata, maksudnya berdampak pada dampak individual, dampak organisasional, dampak pada masyarakatnya, dan dampak pada lembaganya sesuai dengan teori Analisis Dampak Sosial oleh Samodra Wibawa.

Ketuju, Jurnal Internasional yang berjudul *Impact Evaluation of Training on Productivity of the Small and Medium Enterprises in Vietnam* pada tahun 2015 oleh Nguyen Khanh Duy dan Nguyen Thi Hoang Oanh (Khanh Duy & Thi Hoang Oan, 2015) Menunjukkan bahwa pembinaan pada sisi produktivitas tepatnya yang menysasar pada *Human Resource* memberikan dampak yang positif terhadap produktifitas bisnis berbasis rumah tangga baik melalui Off the job training dan on the job training.

Kedelapan, Jurnal Internasional yang berjudul “*What are the biggest obstacle to Growth of SMEs in Developing Countries?*” oleh Yao Wang pada tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk melihat urutan hambatan pertumbuhan UMKM di negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hambatan dalam pertumbuhan UMKM di negara berkembang yang berupa akses permodalan (*access to finance*), Tingkat Pajak (*Tax rate*), Kompetisi (*competition*), kelistrikan (*electricity*), dan Faktor politik (*political factors*), akses permodalan merupakan hambatan terbesar yang dihadapi UMKM dan selanjutnya adalah kompetisi. Berdasarkan jurnal tersebut, penulis memberi persepsi awal bahwa adanya hambatan terbesar yang juga dihadapi UMKM di Kabupaten Sragen tidak jauh dari akses permodalan dan faktor kompetisi dengan produk UMKM lain maupun yang bukan UMKM atau perusahaan besar.

Kesembilan, Publikasi yang berjudul “*Innovation and SME finance : Evidence from Developing Countries*” oleh Wellalage dan Fernandez pada tahun 2019. Publikasi ini berupa Review dari Analisis Permodalan Internasional (*International Review of Financial Analysis*) dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari publikasi

menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara permodalan formal dan produk dan proses inovasi (*A propensity score matching approach reports a positive relationship between formal finance and product and process innovation*). Sedangkan permodalan informal memiliki dampak yang lebih pada inovasi produk dewasa (*However, informal finance has more significant impact on mature firms' product innovation.*). Bagi penulis, penelitian ini menunjukkan kajian referensi dari UMKM yang menjadi lokus. Dimana muncul dan berkembangnya UMKM sangat bergantung pada permodalan formal sebagai “fondasi” dari suatu munculnya perkembangan UMKM.

Kesepuluh, publikasi yang berjudul *“Does Age Matter? The Impact Of Smes Age On The Relationship Between Knowledge Sourcing Strategy And Internationalization”* oleh Santoro dkk pada tahun 2018. Publikasi tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan lebih dari 100 UMKM. Hasil dari publikasi menunjukkan bahwa adanya dukungan positif hubungan antara strategi sumber pengetahuan dan internasionalisasi namun tidak merubah peranan umur usaha (*we found support for the positive relationship between knowledge sourcing strategy and internationalization but not for the moderating role of firm age*). Penulis malah berasumsi bahwa usaha yang sudah cukup berumur akan memberi peranan positif terhadap dampak yang ditimbulkan, sesuai dari teori analisis dampak sosial.

Dengan Teori yang digunakan tersebut, dapat menjadi tambahan referensi penulis. Posisi penulis pada penelitian tersebut yakni sebagai pengamat dan berusaha

mengambil informasi yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Pertama, penulis berasumsi bahwa pembinaan UMKM yang ada di Kabupaten Sragen juga dapat dilaksanakan pada pembinaan pada sisi *human resource* nya. Kedua, melihat dari perspektif ADS oleh Samodra Wibawa, bahwa dari jurnal tersebut, condong kearah dampak individunya.

Dari penelitian terdahulu, dapat saya simpulkan bahwa masih banyak perbedaan perbedaan pada tiap jurnal dengan apa yang penulis nantinya ingin mencoba cari yaitu berdasarkan ADS oleh Samodra Wibawa. Pada jurnal jurnal tersebut hanya mengacu dari satu atau dua dimensi dampak dalam ADS.

1.5.8. Konsep Pembinaan

Pembinaan merupakan determinan penting untuk memberikan daya/kekuatan manusia agar menjadi sumber tenaga yang professional sebagaimana yang diarahkan pada tujuan pembinaan itu sendiri. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, terjadinya evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan sesuatu. ada dua unsur dalam pengertian ini yakni pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan kedua pembinaan menunjuk kepada perbaikan atas sesuatu. Memahami tentang pembinaan, dapat dilihat dari sudut pandang, yaitu pembinaan kemanusiaan yakni pembinaan yang dilakukan dengan memenuhi kebutuhan hidup karyawan dan keluarganya baik jasmani maupun rohani. Sedangkan pembinaan keahlian dilakukan dengan memenuhi kebutuhan karyawan untuk bekerjasama mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, dan dalam hal ini tujuan untuk

mencapai produktivitas, efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Kedua kebutuhan apabila dipenuhi akan memberikan kontribusi yang berarti bagi para pengusaha dalam mengembangkan usahanya.

Berdasar Regulasi yakni Perda Kabupaten nomor 3 tahun 2013 tentang UMKM, pembinaan dilakukan melalui pemberian pembinaan, fasilitas, bantuan penguatan permodalan dan memberikan pedoman pengembangan usaha. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan institusi/lembaga lainnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan. Pembinaan dapat melalui kegiatan antara lain :

1. Pemberian penyuluhan, pelatihan, peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bidang manajemen serta pengembangan teknologi
2. Pembuatan panduan pengembangan usaha
3. Pendampingan
4. pemberian advokasi hukum dan pembelaan dalam kesempatan berusaha

Pembinaan yang penulis ambil secara keseluruhan terpacu pada regulasi yang ada. Hal ini karena bentuk bentuk pembinaan telah tertulis di kebijakan. Nantinya, bentuk bentuk tersebut dijadikan acuan dalam membuat instrumen penelitian yang digunakan untuk menggali informasi.

Susunan kajian teori yang telah ditulis diatas, penulis tarik kesimpulan dengan tujuan agar nantinya akan dapat dijadikan instrumen penelitian secara lebih lanjut mulai dari efektivitas kebijakan hingga mengkaji dampak dari efektivitas kebijakan tersebut.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Definisi operasional adalah serangkaian langkah-langkah prosedural dan sistematis yang menggambarkan kegiatan demi mendapatkan eksistensi empiris dari suatu konsep. Dalam penelitian ini yang dioperasionalkan adalah :

1.6.1. Evaluasi Proses Program Pembinaan UMKM

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang berusaha menjawab pertanyaan mengenai bagaimanakah program berjalan. Program pembinaan UMKM adalah rangkaian upaya meliputi pemberian pembinaan, fasilitas, bantuan penguatan permodalan dan memberikan pedoman pengembangan usaha oleh pemda Kabupaten Sragen kepada pelaku UMKM. Fenomena yang peneliti gunakan untuk melakukan analisis efektivitas pembinaan UMKM :

1. Tepat Kebijakan adalah sejauh mana kesesuaian antara apa yang dijadikan regulasi dan yang dilaksanakan kepada objek regulasi, meliputi :

a. Pelaksanaan pembinaan yaitu :

- 1) Pemberian penyuluhan. Penyuluhan disini berupa arah kebijakan nasional yang berkaitan dengan UMKM, pangsa pasar UMKM, kemudahan sarana prasarana, modernisasi kegiatan UMKM dan lain sebagainya.
- 2) Pelatihan. Pelatihan disini dapat berupa pelatihan produksi sampai dengan pemasarannya.
- 3) peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bidang manajemen serta pengembangan teknologi dalam upaya peningkatan kualitas UMKM
- 4) Pembuatan panduan pengembangan usaha untuk dunia UMKM

- 5) Pendampingan dalam hal produksi sampai pengelolaan keuangan dan peningkatan daya saing UMKM
 - 6) pemberian advokasi hukum dan pembelaan dalam kesempatan berusaha apabila terdapat kendala dalam hal hukum
- b. Kesesuaian antara masalah yang dihadapi dengan kebijakan yang dikeluarkan. Melihat apakah masalah yang banyak ditemui oleh pelaku UMKM sudah terjawab dengan adanya regulasi yang dikeluarkan beserta pelaksanaan regulasinya.
2. Tepat Pelaksana adalah terkait dengan siapa dan peranannya dalam mengimplementasikan kebijakan kepada objek kebijakan, meliputi :
- a. Peran dari pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan. Peranan dari pihak pemerintah disini diperkirakan tidak hanya Dinas Koperasi dan UMKM saja, namun ada kemungkinan ikut andil perannya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas lain yang mengadakan pelatihan di Kabupaten Sragen
 - b. Peran dari swasta dalam pelaksanaan kebijakan. Peran swasta disini diperkirakan melalui FEDEP (*Forum of Economic Development and Employment Promotion*) serta kemungkinan lain seperti adanya pemanfaatan dana CSR (*Coorporate Social Responsibility*) yang ikut berperan dalam regulasi ini.
 - c. Dukungan pemerintah dan swasta terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Berupa kerjasama antara pihak swasta dengan pihak pemerintah daerah

dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM yang ada di Kabupaten Sragen

3. Tepat Target adalah kesesuaian objek regulasi yang akan dituju agar dapat mencapai tujuan regulasi itu sendiri serta memberi suatu manfaat kedepannya, indikator meliputi :
 - a. Kesiapan masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan UMKM. Apakah masyarakat merasa di zona nyamannya atau memerlukan adanya perubahan demi meningkatkan UMKMnya, ketersediaan dalam menjalankan program pemerintah daerah dan kesanggupan lain seperti waktu, tenaga dan pikiran untuk melaksanakan program pemerintah daerah
 - b. Respon pelaku UMKM terhadap regulasi tentang UMKM, meliputi berupa pelaksanaan kegiatan UMKM dengan tidak bertentangan dengan peraturan, melayani konsumen dengan sebaik mungkin, pemberian informasi secara jujur kepada konsumen, melakukan usaha ditempat yang sudah ditetapkan dan diijinkan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup
4. Tepat Lingkungan adalah kesesuaian serta interaksi antar pihak pembuat kebijakan demi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya mencapai efektivitas. Indikatornya adalah :
 - a. Koordinasi pemerintah dengan agen pelaksana atau koordinasi implementor kebijakan, baik antar SKPD atau dengan swasta. Koordinasi disini meliputi adanya tanggung jawab, kerjasama, proses yang kontinyu, pengaturan kelompok secara teratur, kesatuan tindakan, dan tujuan bersama antara

pemerintah daerah dengan SKPD nya yakni Dinas Koperasi dan UMKM serta dinas lain yang diperkirakan ikut andil

- b. Pendapat pelaku UMKM mengenai efektivitas pembinaan. Preferensi warga sebagai objek regulasi menjadi salah satu tolok ukur yang dapat dijadikan cermin apakah implemmtasi ini berlangsung secara baik atau ada kendala di lapangan
5. Tepat Proses adalah memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan, indikatornya meliputi :
- a. Pemahaman terkait dengan manfaat yang akan diperoleh dari kebijakan Tersebut. Pemahaman dari pihak pelaku atau implementor dan objek kebijakan mengenai apa yang nantinya akan di capai dari kebijakannya.
 - b. Penerimaan efektivitas kebijakan tersebut sebagai tugas bersama
 - c. Kesiapan pemerintah dan agen pelaksana dalam menjadi agen pelaksana.

1.6.2. Pembinaan UMKM

Pembinaan UMKM adalah rangkaian kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan mutu secara efisien dan efektif agar memperoleh hasil produksi dari UMKM tersebut menjadi lebih baik. Pembinaan UMKM yang dilakukan dapat berupa :

1. Pemberian penyuluhan, pelatihan, peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bidang manajemen serta pengembangan teknologi
2. Pembuatan panduan pengembangan usaha
3. Pendampingan UMKM
4. pemberian advokasi hukum dan pembelaan dalam kesempatan berusaha

1.6.3. Dampak Pembinaan UMKM

Dampak pembinaan adalah perubahan kondisi fisik maupun non fisik sebagai akibat dari output kebijakan. Pembinaan UMKM diantaranya dampak individual meliputi dampak ekonomi, dampak sosial dan dampak organisasional atau kelompok. Namun tidak menutup kemungkinan akan memberikan dampak yang tak diharapkan seperti dampak psikis juga pada dampak individual

1.6.3.1. Dampak Individual

Dampak Individual adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan yang berkenaan pada seorang person itu sendiri.

1. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi adalah perubahan suatu kondisi yang berkaitan dengan keadaan finansial, daya beli, pendapatan. Melihat mengenai perekonomian yang ada setelah adanya pembinaan UMKM bagi individual, seperti pemilik usaha dan tenaga kerja yang berkecimpung pada pelaku usaha ini. Dampak. Indikator dari dampak ekonomi antara lain :

A. *Indirect Effect* meliputi perubahan tingkat harga produk, kualitas dan kuantitas produk, dan varietas produk, ketersediaan alat dan perlengkapan yang ada pada suatu UMKM

B. *Direct Effect* meliputi kiat penjualan pada tiap perorangan, kesempatan atau peluang kerja pada sektor atau bidang lain

C. *Induced Effect* meliputi pendapatan individu dari sektor UMKM

2. Dampak Psikis

Dampak psikis adalah perubahan kondisi seseorang yang berkaitan dengan psikologisnya terkait dengan sikap atau tindakan yang terdapat pada individu, pekerja dan pemilik usaha setelah mendapat pembinaan UMKM, apakah orang tersebut menjadi termotivasi, tertekan, senang, atau sebagainya.

Indikator dari dampak psikis antara lain :

- A. Kepercayaan diri untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh atau berinovasi
- B. Pemicu daya kerja untuk tetap berkeinginan di UMKM yang saat ini menjadi tempat bekerja
- C. Rasa senang
- D. Tertekan dalam hal melaksanakan pekerjaan produksi atau pun kegiatan lain seperti distribusi

3. Dampak lingkungan

Adalah dampak yang terjadi pada individu yang berkaitan pada lingkungan yang ditempatinya. Dampak lingkungan antara lain :

- A. Kondisi lingkungan pribadi, apakah nampak lebih kumuh atau lebih tertata khususnya bagi pemilik usaha UMKM, keleluasaan tempat tinggal, yang dimungkinkan adanya bantuan peralatan, menjadikan tempat tinggal lebih sempit dari sebelumnya
- B. Pemindahan tempat tinggal akibat adanya program pembinaan. Dimungkinkan adanya pemindahan tempat tinggal karena faktor produksi yang lebih mutakhir daripada sebelum adanya program pembinaan.

1.6.3.2. Dampak Terhadap Masyarakat

Dampak terhadap masyarakat adalah dampak dari suatu kebijakan terhadap masyarakat menunjuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya, karena masyarakat merupakan suatu unit yang melayani para anggotanya. Dampak pada masyarakat dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Rasa kekeluargaan dan kebersamaan pada masyarakat
2. Mendorong terciptanya UMKM baru di masyarakat akibat peningkatan kemandirian dan jiwa kewirausahaan
3. Menyelenggarakan peningkatan dan pengembangan kapasitas kompetensi sumber daya manusia

1.6.3.3. Dampak Organisasional atau Kelompok

Adalah perubahan kondisi yang saling bersangkutan antar individu, individu dengan kelompok, dimana arti dari organisasi atau kelompok yang dimaksud pada konteks ini yakni UMKM. Dampak dari suatu kebijakan dapat dirasakan oleh suatu organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Dampak Langsung

Adalah perubahan kondisi yang langsung dirasakan pada UMKM tersebut dari implementor kebijakan. Indikator yang dapat digunakan antara lain :

- A. Bantuan pemerintah daerah kepada pelaku UMKM setelah dilaksanakannya pembinaan berdasar Perda Kabupaten tersebut
- B. Perolehan keuntungan atau benefit lainnya setelah adanya pembinaan yang dilaksanakan

2. Dampak Tidak Langsung

adalah perubahan kondisi yang timbul yang didahului karena perubahan kondisi pada objek lain atau melalui proses dan waktu.

A. Tingkat semangat kerja pada UMKM lain setelah dilaksanakannya pembinaan UMKM oleh Pemkab

B. Tingkat kedisiplinan kerja pada UMKM setelah dilaksanakannya pembinaan.

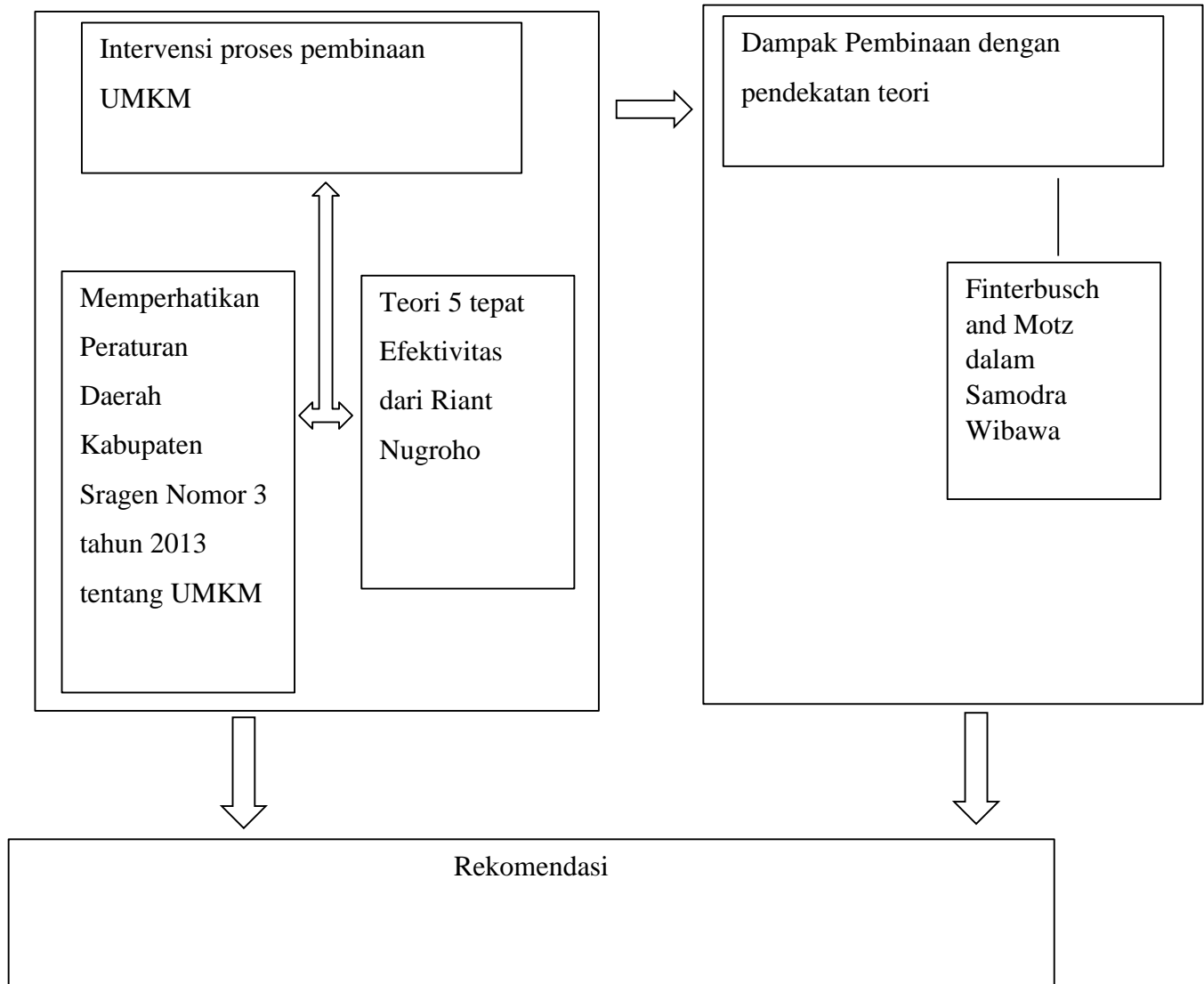
1.6.3.4. Dampak Sosial Budaya.

Adalah perubahan kondisi yang terletak pada organisasi yang tingkatannya lebih penting, dalam hal ini yang dimaksud adalah pada dinas terkait. Dampak pada Lembaga menggunakan beberapa indikator yang relevan yakni :

1. Dampak terhadap struktur populasi. Apakah pembinaan UMKM menyebabkan ketertarikan orang lain untuk tinggal di sekitar tempat pembinaan. Baik untuk melaksanakan penelitian, pengabdian atau memberikan bantuan terhadap UMKM yang ada
2. Dampak terhadap struktur mata pencaharian. Melihat apakah pembinaan memberi dampak kepada penduduk setempat untuk beralih profesi secara dominan
3. Dampak terhadap transformasi tata nilai atau hubungan antar masyarakat. Melihat apakah adanya perubahan hubungan antar masyarakat, seperti antara yang tidak mendapat pembinaan dengan yang mendapat pembinaan, atau hasil kesuksesan akibat pembinaan dengan yang belum sukses dari adanya pembinaan.

4. Dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Mengetahui apakah ritme mobilitas penduduk semakin cepat karena adanya pembinaan mengingat diperkirakan adanya perubahan kebutuhan di UMKM atau orang di sekitar UMKM
5. Pola pembagian kerja masyarakat. Melihat apakah dampak pembinaan membuat masyarakat memiliki pola pembagian kerja yang ada pada masyarakat seperti keorganisasiannya

1.6.4. Kerangka Berpikir Penelitian



1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini menranskrip kegiatan seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur dengan metode wawancara mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif, kemudian menafsirkan makna data. Penelitian ini bersifat deskriptif karena memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau peristiwa yang terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis

1.7.2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah penetapan tempat atau penelitian dilaksanakan. Tempat penelitian ini adalah di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak yang menjadi sampel dalam sebuah penelitian. Sedangkan Informan adalah subjek yang memahami objek penelitian. Pada penelitian ini, teknik dalam memilih informan adalah teknik purposive sampling yang mana sampel dipilih bergantung pada tujuan penelitian. Adapun kriteria informan yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Informan yang dapat dipercaya
- 2) Mengetahui mengenai program sebagai pelaksanaan dari regulasi

- 3) Memiliki wawasan mengenai kondisi yang terdapat pada objek regulasi

1.7.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat deskriptif kualitatif, yang perolehannya berasal dari :

- 1) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen
- 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 3) FEDEP
- 4) Pihak Swasta
- 5) Pelaku kegiatan ekonomi UMKM
- 6) Bahan Kepustakaan

1.7.5. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi 2 yaitu primer dan sekunder ;

- 1) Data primer

Data primer diperoleh langsung dari informan yaitu Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sragen, Pelaku kegiatan UMKM

- 2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti jurnal, artikel, skripsi, regulasi-regulasi, dan dokumen penting lain yang dapat digunakan.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan informan dengan metode wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan *deep information* dari informan.

Peneliti juga melakukan studi kepustakaan melalui pencarian dan penemuan bukti yang dianggap perlu untuk menunjang penelitian

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2014)

2) Penyajian Data

Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau lainnya. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (Sugiyono, 2014) menyatakan bahwa dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Huberman dan Miles juga menyarankan untuk memberi sajian data berupa grafik, matrik, jejaring kerja ataupun matrik selain dalam bentuk naratif.

3) Kesimpulan dan verifikasi

Setelah melakukan reduksi data lalu penyajian data agar lebih mudah dipahami, lalu perlu melakukan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak menemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2014)

1.7.8. Kualitas Data

Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pengujian *depenability*. Pengujian *depenability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian (Sugiyono, 2014). Metode ini diperlukan untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh melalui proses proses yang dilaksanakan di lapangan. Proses audit dilakukan oleh auditor yang independen. Apabila peneliti tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan “jejak aktifitas lapangannya” maka *depenabilitas* penelitiannya perlu diragukan (Sanafah Faisal, 1990 dalam Sugiyono, 2014)